BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

A. Dinamika Elite Politik Lokal Desa Padas Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun

Dalam penelitian yang dilakukan mulai tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan 20 Januari 2017, peneliti telah banyak menemukan data tentang dinamika Elite politik lokal yang ada di Desa Padas sampai pada Pemilihan Kepala Desa Padas Tahun 2015.

1. Dinamika Politik Pemerintahan Desa Padas Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

Desa Padas memiliki sejarah panjang dalam sistem kepemimpinan desa. Dimana sampai saat ini sudah berganti 6 kali Kepala Desa. Dalam pola pergantian kepala desa ini terjadi suatu perubahan dari masa ke masa. Perubahan tersebut merupakan sebuah dampak dari pengaruh konstelasi baik perpolitikan pusat dan daerah juga adanya perubahan sosial masyarakat. Atas perjalanan panjang sistem politik yang terbentuk di Desa Padas ini, peneliti membaginya dalam dua fase. Kedua fase ini menunjukkan jenjang waktu dan kondisi sosial-politik yang memengaruhi. Pada fase awal terlentang mulai kepemimpinan pertama sampai peristiwa reformasi. Sedangkan fase kedua mulai pada masa reformasi hingga saat ini. Fokus penelitian ini pada ranah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilihan Kepala Desa Padas tahun 2015, namun peneliti ingin memaparkan tentang sejarah Elite lokal hingga sampai sekarang ini.

Pada fase awal dalam pembahasan Elite politik lokal ini membahas tentang hegemoni keluarga dalam menguasai kekuasaan politik desa. Sedangkan pada fase kedua akan membahas tentang Elite politik lokal berbasis budaya pencak silat. Keduanya akan dibahas dan dianalisis untuk melihat bagaimana kondisi sosial politik dan peran yang dimainkan para aktor Elite lokal dalam mewarnai dinamika politik Desa Padas.

a) Elite Lokal Berbasis Keluarga dalam Dinamika Politik Desa Padas

Sepanjang sejarah pemerintahan Desa Padas menunjukkan adanya suatu kekuasaan yang berbasis keluarga. Kekuasaan berbasis keluarga ini memainkan peranannya dalam membangun struktur pemerintahan di Desa Padas. Ada empat kepemimpinan awal Desa Padas yang syarat akan hegemoni kekuasaan keluarga. Pendiri awal sekaligus Kepala Desa pertama Desa Padas adalah Ponco Laksono. Selanjutnya secara turun temurun keluarga Ponco Laksono ini memiliki pengaruh besar dalam menguasai pemerintahan desa Padas. Seperti yang diungkapkan Kepala Desa Padas, mengemukakan tentang proses kepemimpinan Desa Padas sebagai berikut :

> "Berdirinya desa ini tidak ada bukti tertulis, karena namanya desa untuk arsip itu biasanya amburadul, yang jelas sebelum masa kemerdekaan desa Padas ini sudah ada. Untuk kepala desa Padas yang pertama itu Ponco Laksono, kemudian diteruskan oleh anaknya bernama Darimen, setelah itu berganti Kasmanto anak dari Darimen, setelah Kasmanto meninggal, sekitar tahun 1990 an diadakan pemilu yang dimenangkan oleh Tony Sumali yang juga anak dari Kasmanto. Setelah Tony Sumali lengser sekitar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 1998 pemilu dimenangkan Heru Sumanto selama dua periode sampai 2009, baru kemudian Saya yang menjadi kepala desa sampai sekarang".[1]

Konstelasi politik yang ada dalam ranah pemerintahan Desa Padas ini mengindikasikan adanya suatu pola kekeluargaan. Dinasti politik yang berkembang pada masa pemerintahan Desa Padas ini merupakan sebuah dampak dari pengaruh perkembangan kondisi sosial-politik Indonesia. Kepemimpinan Ponco Laksono yang dimulai sebelum kemerdekaan Republik Indonesia menjadi suatu patokan kondisi sosial masyarakat yang masih jauh dari sistem demokratis. Kondisi sosial budaya masyarakat menjadi titik temu terhadap pola kehidupan perpolitikan desa.

Desa Padas yang terletak di pedalaman Madiun ini memiliki corak kehidupan sebagai pemangku adat Jawa yang masih kental. Konstruktifitas Adat Jawa memengaruhi paradigma masyarakat dalam struktur sosial masyarakat. Paradigma ini menempatkan status kedudukan seseorang dari segi kesaktian dan kekuatan *mistik* pada tingkat tertinggi dalam stratifikasi sosial masyarakat. Stigma masyarakat yang berkembang tersebut menjadi acuan dalam menentukan kepemimpinan desa. Pandangan ini seperti dalam pengklasifikasian tipe kepemimpinan yang dikemukakan oleh Max Weber, dimana tipe yang pertama adalah Kharismatik muncul karena sifat-sifat kharismatik yang dimilikinya, yaitu sifat kesaktian atau kekuatan yang dianggap luar biasa

[1]Wasis, *Wawancara*, Desa Padas, 21 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melekat atau dimiliki seseorang yang menurun sebagai warisan dari leluhurnya.[2]

Konstruksi sosial masyarakat tersebut mencerminkan kondisi pola pikir masyarakat yang masih terbelakang. Sehingga tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai kekuatan secara kebudayaan bisa memainkan perannya untuk menduduki pemerintahan desa. Jika ditarik dalam kondisi masyarakat Desa Padas masa itu sangat sesuai, hal ini karena keadaan masyarakat sebelum kemerdekaan masih miskin terhadap ilmu pengetahuan. Dari segi akses mereka juga terbelenggu oleh kondisi kolonial. Demikian pula percaturan politik di desa selalu dikuasai oleh orang-orang yang memiliki status sosial tinggi di Masyarakat.

Sistem politik yang ada di Desa Padas selanjutnya, lebih memperlihatkan adanya sifat turun-menurun. Hegemoni kekuasaan keluarga mampu menjadi suatu kekuatan dalam mempertahankan kedudukan politik. Kepemimpinan Ponco Laksono sendiri berlangsung lama, karena lemahnya intervensi pemerintah saat itu. Setelah Ponco Laksono lengser kemudian digantikan oleh anaknya yang pertama yaitu Darimen. Demikian pula kepemimpinan Desa selanjutnya diberikan kepada anaknya yang bernama Kasmanto. Kepemimpinan Kasmanto ini sudah menunjukkan pada Era Orde baru, sehingga kekuasaan pemerintahan desa begitu sangat mutlak karena ditopang oleh kekuatan politik pusat.

[2] Sondang P. Siagian, *Teori dan Praktik Kepemimpinan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konstelasi politik selanjutnya masih menunjukkan hegemoni Keluarga Ponco Laksono dalam membentuk struktur pemerintahan Desa Padas. Setelah Kasmanto lengser kepemimpinan ini sedikit kosong dan dijabat sementara oleh Suradi yang berkedudukan sebagai Kepala Dusun Made waktu itu. Setelah diadakannya Pemilihan Kepala desa ternyata kekuatan keluarga masih melekat dalam konstruksi pemikiran masyarakat. kemenangan Tony Sumali anak dari Kasmanto sebagai kepala desa selanjutnya, membuktikan kuatnya hegemoni kekuasaan keluarga dalam dinamika politik Desa Padas.

Kondisi dinamika politik lokal masa itu mengindikasikan bahwa keluarga besar Ponco Laksono menjadi Elite politik lokal sekaligus Elite lokal masyarakat. Sesuai dengan Teori Elite lokal yang dikemukakan Suzanna Keller bahwa Elite tidak bersifat tunggal, Elite merupakan individu atau kelompok yang memiliki latar belakang massa masing-masing.[3] Dimana keluarga Ponco Laksono menjadi Elite tunggal dalam menguasai sistem politik dan pemerintahan desa. Elite Di desa Padas ini tersusun secara hirarki dalam menempatkan anggota keluarga pada struktur pemerintahan desa. Dengan memanfaatkan paradigma budaya yang menempatkan statusnya dalam posisi Elite dimasyarakat, Keluarga Ponco Laksono melakukan monopoli kekuasaan politik desa. Kekuasaan

[3] Suzzan Keller, *Penguasa Dan Kelompok Elite* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995): Birhan Aditya Nadeyoga, "Peran Elite Organisasi Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Dalam Proses Politik Pemilihan Legislatif 2014 Di Kabupaten Nganjuk, *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4 No. 1, (Januari, 2014), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga Ponco Laksono tidak hanya terpaku pada kekuasaan Kepala Desa, melainkan juga sampai jabatan perangkat desa lainnya dikuasai anak turunnya. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Kepala Desa Padas bahwasannya :

> "Memang keluarga dari Ponco Laksono ini mampu menguasai pemerintahan desa, mulai lurah (Kepala Desa) sampai perangkat desa dan jajarannya banyak ditempati keluarga ini. Seperti Darimen anak pertamanya meneruskannya menjadi kepala desa, kemudian anaknya yang kedua Ponco Karso menjadi Kamituwo (Kepala Dusun) Made, anaknya yang ketiga Soewiryo menjadi Jogoboyo (Kaur Keamanan), kemudian anaknya yang keempat bernama Sarjo menjadi Kamituwo (Kepala Dusun) Sempu. Setelah itu jabatan mereka diturunkan ke anaknya masing-masing, seperti kepala desa nya secara turun-temurun mulai Kasmanto, Tony Sumali hanya Heru Sumanto dari keluarga lain. Begitu juga jabatan Kepala dusun made dari Ponco Karso diturunkan Suradi, kemudian kepala dusun Sempu dari Sarjo diturunkan ke Wijianto. Setelah Heru Sumanto lengser pemimpin desa kembali lagi kekeluarga Ponco Laksono, Saya ini anak dari Bapak Suradi keturunan Ponco Karso."[4]

Kekuasaan Keluarga Ponco Laksono terlihat begitu kuat dalam mengakomodasi seluruh jabatan perangkat Desa Padas. Melalui posisinya sebagai pemimpin Desa Padas, Ponco Laksono menggunakan kekuasaan politiknya untuk menguasai poros-poros kekuasaan desa. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari sosok Ponco Laksono yang telah berkontribusi melakukan suatu monopoli kekuasaan desa. Semua anak Ponco Laksono mendapatkan suatu kedudukan dalam Desa Padas. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Suzanna Keller bahwasannya Elite lokal berbeda dalam adanya distribusi kekuasaan yang di laksanakan oleh Elite. Tetapi di dalam perbedaan tersebut ada kesimpulan hal yang sama, contohnya adalah social goods yang tidak bisa di bagikan secara

[4] Wasis, *Wawancara*, Desa Padas, 21 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merata.[5] Ponco Laksono melakukan suatu hegemoni pemerintahan Desa Padas dengan cara melakukan distribusi kekuasaan kepada seluruh anak-anaknya. Sehingga menutup kemungkinan adanya kekuatan lain yang muncul dalam merubah sistem pemerintahan Desa Padas. Sistem pemerintahan berbasis keluarga yang dimainkan oleh Ponco Laksono bisa terlihat dari bagan dibawah ini :

Bagan 4.1 Tentang Distribusi Kekuasaan Keluarga Ponco Laksono

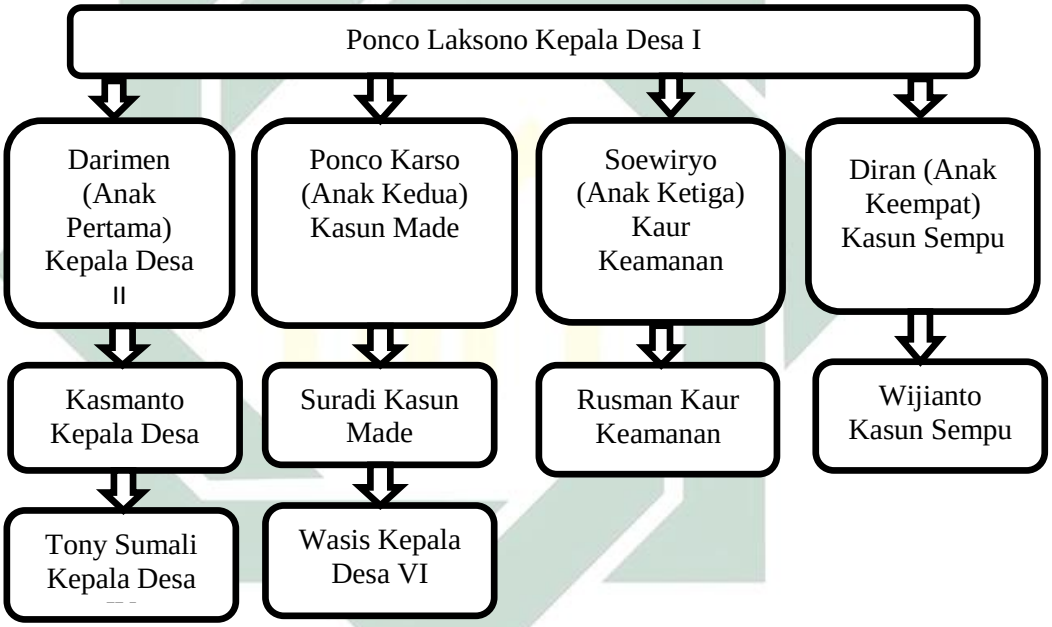

Distribusi kekuasaan politik tersebut disusun secara hirarki menurut adat kepercayaan Jawa. Penentuannya berpatokan pada tolak ukur pola urutan anak. Anaknya yang pertama, Darimen diberikan warisan jabatan Kepala Desa Padas. Setelah itu yang kedua, bernama Ponco Karso menjadi Kepala Dusun Made. Anaknya yang ketiga,

[5] Suzzan Keller, *Penguasa Dan Kelompok Elite* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995): Birhan Aditya Nadeyoga, "Peran Elite Organisasi Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Dalam Proses Politik Pemilihan Legislatif 2014 Di Kabupaten Nganjuk, *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4 No. 1, (Januari, 2014), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bernama Soewiryo diangkat menjadi Jogoboyo (keamanan) Dusun Made, dan yang terakhir bernama Diran diberikan kekuasaan Kepala Dusun Sempu.

Kemudian Kekuasaan tersebut masih bersifat turun-temurun dimana, kekuasaan Darimen dipegang oleh anak-anaknya sampai ke Tony Sumali. Jabatan Kepala Dusun Made kemudian diturunkan ke Anak dari Ponco Karso bernama Suradi, begitu juga Dusun Sempu yang diwariskan ke Wijianto. Hampir titik vital dari kekuasaan Desa Padas dikendalikan oleh keluarga Ponco Laksono.

Dengan distribusi jabatan yang sangat mencolok tersebut, Ponco Laksono menghegemoni kekuasaan dengan cara menggerakan masyarakat melalui kedudukan aparatur desa. Konstruk pemikiran yang masih primordial menyebabkan status perangkat desa memiliki kedudukan tinggi di lingkungan masyarakat. Dengan kewenangannya masyarakat bisa dikendalikan dengan sistem tersebut. Sehingga kekuasaan keluarga ini secara otomatis ditopang oleh seluruh struktur internal desa.

Konstelasi politik Desa Padas menemui perubahan ketika memasuki masa reformasi. Dimana hegemoni keluarga Ponco Laksono terhadap kepemimpinan desa, telah jatuh ke tangan Heru Sumanto dari keluarga lain. Heru Sumanto merupakan Warga Dusun Sempu Rt 7, mampu menggantikan peran keluarga Ponco Laksono dalam dinamika politik desa. Meski perangkat desa lainnya masih dikendalikan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

basis keluarga Ponco Laksono, namun munculnya Heru Sumanto menjadi Kepala Desa Padas ke lima ini mengindikasikan adanya faktor perubahan sosial.

Perubahan dinamika dalam ranah sistem politik negara seringkali diikuti dengan perubahan yang terjadi dalam struktur pemerintahan desa. Perbedaan unsur kepentingan politik penguasa menjadi penentu terciptanya aktor politik daerah. Sehingga pelaku politik daerah menjadi sasaran untuk mencapai tujuan penguasa. Namun tidak jarang para aktor dalam lingkup daerah juga memanfaatkan perubahan dinamika politik pusat. Konstelasi politik penguasa yang berubah ke sistem yang lebih terbuka mendorong kekuatan-kekuatan politik lokal untuk muncul kepermukaan. Mereka menunggangi kondisi sosial-politik untuk mencapai basis-basis ekonomi dan politik dalam menguasai kehidupan sosial masyarakat.

Pada masa kepemimpinan Ponco Laksono hingga keturunannya Tony Sumali, berada dalam kondisi sosial-politik pemerintahan pusat yang belum mencerminkan demokratis. Kondisi percaturan politik Desa Padas cenderung masih terpengaruh struktur sistem politik penguasa negara. Oligarki kekuasaan keluarga Ponco Laksono ini terbantu oleh konstelasi sistem politik nasional.

Sebelum masa kemerdekaan, struktur pemerintahan desa cenderung menganut pada sistem yang diterapkan pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial secara otomatis menerapkan sistem yang berkaitan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan budaya yang berkembang. Pengaruh kerajaan masih melekat erat karena politik kolonial yang memanfaatkan penguasa lokal untuk mencapai tujuannya. Penguasa lokal ini umumnya berbasis budaya, ikatan primordial masyarakat masih kental, sehingga doktrin kekuasaan yang bersifat oligarki tersebut bisa terus mewarnai politik desa.

Sistem yang diterapkan masa kolonial merupakan sebuah struktur yang memanfaatkan penguasa daerah dalam menggerakkan masyarakat. Meski Ponco Laksono menjadi pelaku yang dimainkan oleh struktur penguasa atas status sosialnya. Ternyata Ponco Laksono mampu memberdayakan kondisi tersebut memainkan posisinya dalam menguasai struktur administrasi pemerintahan desa.

Setelah masa kemerdekaan, kondisi nasional cenderung terjadi distabilitas politik akibat adanya tarik menarik kekuatan politik pusat. Akibatnya pemerintah belum maksimal dalam menjamah kehidupan pemerintahan sampai tingkat desa. Kenyataan tersebut menjadikan pola kebudayaan masih eksis dalam mengendalikan kekuasaan desa. Elite lokal yang berbasis konstruksi budaya begitu kuat dalam memengaruhi sistem politik desa. Keadaan tersebut diperparah dengan konstelasi politik pemerintahan orde baru yang menerapkan pola otoritarian kekuasaan. Pemerintah menggunakan basis kekuatan birokrasi sampai tngkat daerah. Sasaran utamanya adalah Elite yang menguasai pemerintahan daerah sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga kedudukan keluarga Ponco Laksono sebagai Elite politik desa sangat terbantu dengan adanya sistem tersebut.

Pada masa kepemimpinan Tony Sumali di Era Orde Baru ini menunjukkan sistem politik neo patrimonialisme. Menurut Crough Neo Patrimonialisme merupakan perpaduan antara sistem kebudayaan yang masuk kedalam pemerintahan modern.[6] Dengan sistem pemerintahan demokratis penguasa Orba menciptakan paradigma politik otoritarian yang menerapkan budaya sebagai langkah politiknya. Pola interaksi bapak-anak dalam kebudayaan Jawa diterapkan dalam proses hegemoni pemerintahan pusat. Kondisi tersebut juga memberikan dampak signifikan pada kelanggengan kekuasaan Oligarki Keluarga Ponco Laksono dalam struktur pemerintahan Desa Padas.

Strategi politik penguasa yang menjadikan birokrasi sebagai alat pemerkuat kekuasaannya berdampak pada posisi Kepala Desa Padas waktu itu. Tony Sumali sebagai pemimpin desa waktu itu mengamankan posisinya lewat pola interaksi antara pemerintahan pusat hingga birokrasi tingkat desa. Hubungan tersebut membentuk pola patron-clien dimana pemerintah pusat bersifat patron karena dengan posisinya memanfaatkan Tony Sumali untuk mengamankan kekuasaannya pemerintah. Namun dilain sisi tersebut, Tony Sumali juga memiliki kepentingan besar akan konstelasi politik pusat waktu itu. Melalui

[6] Edisius Riyadi Terre, *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya selama Abad 21 hingga Era Reformasi/Tod Jones* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

posisinya sebagai pemimpin desa yang dekat dengan kekuatan pusat, Tony Sumali mulai memonopoli kekuasaannya.

Kondisi tersebut telah menambah panjang kekuasaan oligarki keluarga Ponco Laksono dalam sistem pemerintahan Desa Padas. Sistem kekeluargaan atau dinasty politik merupakan suatu warisan dari budaya politik keraton. Pola melanggengkan kekuasaan melalui sistem turun-temurun telah memengaruhi konstruksi berpikir masyarakat. Proses tersebut juga terjadi pada sistem pemerintahan yang telah menerapkan konsep negara demokrasi. Meski sistem pemerintahan terbilang lebih terstruktur dan masih, namun pelaku politik desa tetap saja dihegemoni kekuasaan keluarga. Distribusi kekuasaan keluarga yang telah mengisi titik-titik sentral jabatan politik di Desa Padas menyimpulkan pola neo patrimonial yang begitu rapi diaplikasikan lewat peranan budaya.

b) Elite Lokal Budaya Pencak Silat

Reformasi merupakan peristiwa dimana masyarakat Indonesia menemui titik puncak ketidakpuasan dengan belenggu otoritarian pemerintah Orde Baru. Dengan adanya reformasi menghendaki adanya perubahan dalam sistem politik yang lebih demokratis. Dimana hasilnya termanifestasi dalam sistem desentralisasi kekuasaan dan adanya wujud otonomi daerah. Otonomi daerah menegaskan adanya kewenangan daerah dalam mengatur dan membangun daerahnya sendiri. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dalam mengatasi kesenjangan sosial antar daerah. Kondisi tersebut ternyata juga mampu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengubah percaturan politik di ranah daerah termasuk wilayah administrasi lingkup desa.

Ketidakstabilan pemerintahan pusat pada masa setelah kemerdekaan hingga masa Presiden Soeharto mengakibatkan kurang terjamahnya sistem politik desa. Akibatnya pola politik desa cenderung masih menginspirasi kebudayaan masyarakat. Doktrin bangunan kekuasaan kerajaan masa sebelum kemerdekaan masih terus membalut sistem politik desa di era demokrasi sekarang ini. Adanya perubahan sistem sosial masyarakat desa ini memang berkaitan dengan pengaruh kondisi politik Indonesia waktu itu. Seperti yang dipaparkan Kepala Desa Padas, sebagai berikut :

> "Jamannya Pak Heru Sumanto itu diluar keturunan keluarga Ponco Laksono. Kemenangannya karena tidak ada yang mau maju dari keluarga Ponco Laksono. Selain itu ada ketidaksenangan masyarakat dengan Pak Tony Sumali, makanya beliau kurang mendapat dukungan untuk maju lagi. Dari segi pembangunan masa Pak Heru juga terkesan tidak ada perubahan selama 10 tahun jabatannya. Kalau kondisi masyarakat desa waktu itu tahun 2000an berbeda dengan kondisi sebelumnya. Saat itu desa ini sangat rawan konflik, banyak perkelahian pemuda antar dusun akibat perbedaan pencak silat. Pak Heru sendiri dalam masa jabatannya juga ikut pencak silat, ikut membaur bersama masyarakat. "[7]

Politik masa Era Orde Baru memang menghegemoni semua bidang. Posisi masyarakat seperti tidak diperkenankan untuk tampil menjadi pesaing pemerintah. Oleh karenanya pemerintah merapatkan basis kekuatannya melalui birokrasi sampai tingkat desa. Hal ini merupakan strategi untuk mendeteksi dan menahan suatu pengaruh yang

[7] Wasis, *Wawancara*, Desa Padas, 21 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkin muncul ke permukaan. Tujuannya adalah melanggengkan kekuasaan pemerintah pusat lewat aktor penguasa sampai tingkat desa. Dampaknya setelah reformasi digulirkan adalah doktrin masyarakat terhadap pemerintah yang cenderung melemahkan kepercayaan rakyat. Oleh karenanya yang terjadi di Desa Padas ini adalah suatu pergantian dinamika Elite lokal.

Kondisi sosial masyarakat masa itu juga mengindikasikan adanya perubahan sistem sosial. Dimana adanya sebuah persaingan pencak silat yang mulai menebarkan pengaruhnya ke masyarakat. Hal tersebut mengindikasikan munculnya pelaku Elite lokal baru dalam percaturan dinamika politik pada proses pemilihan umum. Pelaku baru ini muncul dengan memanfaatkan kondisi transisi sistem demokrasi yang ada di Indonesia.

Di Indonesia indikasi utamanya adalah adanya reformasi sebagai tanda lengsernya Orde Baru telah memberikan angin segar bagi kehidupan demokrasi. Setelah lengsernya pemerintahan pusat ini juga diiringi oleh adanya otonomi daerah yang diwujudkan untuk menciptakan desentralisasi pembangunan.[8] Elite lokal yang muncul di wilayah Desa Padas adalah kekuatan golongan masyarakat berbasis budaya pencak silat. Kelompok ini kemudian membentuk suatu karakter yang menjadi identitas dalam sebuah lingkungan. Sehingga

[8] Moch Nurhasim, *Konflik antar Elite politik lokal: dalam pemilihan kepala daerah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberadaannya seperti mengendalikan lingkungan lewat budaya yang berkembang.

Pencak silat mulai berkembang di Desa Padas ketika menginjak masa akhir pemerintahan Soeharto. Keberadaannya berkembang pesat pada masa sesudah reformasi. Jumlah pencak silat yang tidak hanya satu yang masuk dalam Desa Padas, mengakibatkan adanya suatu benturan kelompok. Posisinya sebagai organisasi kelompok pemuda tersebut memberikan dampak positif terhadap perkembangan pencak silat. Pasalnya kondisi Desa Padas yang mayoritas lebih dominan kaum usia produktif ini adalah pemuda yang belum menikah. Sehingga perannya untuk terlibat dalam perkembangan pencak silat ini sangat aktif dan partisipatif. Budaya pencak silat kemudian memainkan perannya lewat konstruksi sosial, dimana adanya suatu nilai identitas yang bersifat represif ke masyarakat. Nilai identitas tersebut adalah basis pencak silat, sehingga menuntut masyarakat untuk terlibat di dalamnya, agar tidak terasing dari lingkungan yang didominasi pemuda. Elektabilitas pencak silat tersebut kemudian berkembang menjadi basis Elite lokal masyarakat. Elite non-politik lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain di lingkup masyrakat.[9]

[9] Moch Nurhasim, *Konflik antar Elite politik lokal: dalam pemilihan kepala daerah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Representatif pemuda dalam mengendalikan lingkungan sangat mencolok. Status pendekar pencak silat mempunyai kedudukan tinggi dalam tatanan sosial. Hal ini karena untuk mencapai posisi tersebut harus melalui proses penggemblengan fisik yang bertahap dan lama. Sehingga berpengaruh pada orientasi berpikir masyarakat bahwa pendekar memiliki predikat sosok manusia yang kuat dan berkedudukan lebih tinggi di masyarakat.

Persaudaraan Setia Hati Terate dan Persaudaraan Setia Hati Winongo merupakan dua pencak silat besar yang masuk ke Desa Padas. Eksistensi kedua pencak silat tersebut secara tidak langsung memaksa masyarakat pada suatu lingkup kawasan untuk masuk ke dalamnya. Pencak silat yang dianggap masih sakral dengan mengedepankan olah kanuragan membentuk suatu stigma positif di Masyarakat.

Keberadaan pencak silat mampu mengikat pemuda desa dalam wadah organisasi silat tersebut. Sehingga mampu mengendalikan struktur sosial masyarakat lewat identitasnya. Heru Sumanto sebagai pemimpin Desa Padas ke lima juga terlibat masuk ke organisasi pencak silat agar dapat mengamankan elektabilitas politiknya. Kondisi tersebut juga sangat menguntungkan karena tidak adanya kontestan dari pihak keluarga Ponco Laksono yang maju. Sehingga Heru Sumanto lebih leluasa meraih basis dukungan dengan ikut pencak silat yang ada di Desa Padas tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya kondisi politik desa berubah kembali ketika Wasis memenangkan Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2009. Wasis merupakan anak dari Suradi keturunan dari keluarga Ponco Laksono sesuai dengan penjelasan bagan diatas. Dalam pencalonannya yang pertama pengaruh keluarga lebih terlihat dominan jika dibandingkan dengan pencalonannya yang kedua. Karena pada pencalonannya yang pertama kekuatan pencak silat terlihat tumpul dalam membangun kekuatan politik.

Perbedaan karakter pencak silat yang berkembangpun juga tidak terlalu berpengaruh karena kedua calon sama-sama dari anggota pencak silat yang sama. Musuhnya adalah Suryani yang juga anggota Setia Hati Terate yang berkembang di Dusun Made. Hal ini seperti yang diungkapkan Kepala Desa Padas terpilih tahun 2015, sebagai berikut :

> "Waktu periode pertama dulu tahun 2009, musuhnya Pak Suryani warga Rt 2 dusun Made. Lebih berat yang ini, karena ini beda organisasi silat dan dusun. Kalau dulu saya bisa menang banyak, karena keluarga saya yang di dusun made, sempu dan petung memberikan dukungan semua. Malah organisasi silat tidak terlalu mencolok, karena kami sama-sama dari SH Terate".[10]

Adanya persamaan organisasi pencak silat ini mengakibatkan adanya perpecahan dalam internal Setia Hati Terate Dusun Made. Akibatnya kekuatan Setia Hati terate ini tidak terlalu dominan dalam memengaruhi dinamika politik lokal di Pemilihan Kepala Desa waktu

[10] Wasis, *Wawancara*, Desa Padas, 21 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu. Unsur kharismatik keluarga sangat terlihat ketika dukungan masa tidak hanya dari basis satu pencak silat saja. Identitas keluarga juga terlihat ketika anggota keluarga Ponco Laksono di Dusun Sempu memberikan dukungannya kepada Wasis. Pada waktu itu organisasi Setia Hati Terate Rayon Padas lebih memilih tidak mengambil tindakan dalam menentukan dukungan. Karena keduanya adalah anggotanya sehingga individualitas sengaja diterapkan untuk mengurangi adanya kemungkinan perpecahan.

Pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2015 ini begitu sangat memperlihatkan variasinya. Terdapat sebuah persaingan kedua pencak silat dalam ranah politik. Pencak silat Setia Hati Terate yang mendiami Dusun Made dan Setia Hati Winongo Tunas Muda yang dilestarikan di Dusun Sempu melakukan suatu persaingan politik. Hal ini terbukti dari data yang diperoleh dari Kepala Desa Padas, sebagai berikut :

> "Pencak Silat sangat berpengaruh dalam pemilu 2015 ini, karena calonnya berasal dari anggota pencak silat semua. Saya sendiri calon no. urut 1 dari anggota SH Terate, dan Pak Sayit yang berasal dari anggota SH Winongo. Saya mendapatkan dukungan penuh dari warga Sh Terate Rayon Padas, saya sendiri termasuk warga sepuh (tua) di SH Terate Padas. Pak Sayit calon No. urut 2 juga mendapatkan dukungan penuh dari warga SH Winongo dusun Sempu. Pak Sayit ini tokoh masyarakat dan anggota tua SH Winongo di dusun Sempu".[11]

Proses pencarian dukungan kedua calon antara Wasis dan Sayit ini melakukan suatu penggalangan kekuatan lewat basis kelompok budaya. Adanya suatu nilai identitas menjadi taruhan dalam persaingan

[11] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan kepala desa tersebut. Hal ini karena perbedaan pencak silat ini berada dalam wilayah yang berjauhan, sedangkan karakter budaya menciptakan identitas lingkungan.

Pertarungan kedua kelompok budaya ini seperti sistem Elite lokal yang dikemukakan Suzana Keller. Dimana dalam Elite pun juga terdapat kelas, Elite kelas pertama dan kelas kedua, dimana Elite kelas kedua akan menjadi pengganti Elite pertama, Elite kedua juga dapat menjadi tandingan Elite pertama jika Elite pertama tidak dapat menjalankan kekuasaan dengan baik.[12]

Dari uraian teori tersebut memperlihatkan bahwasannya antar Elite pencak silat yang saling bersaing ini menimbulkan suatu kelas. Dimana Setia Hati Terate dalam kemenangannya dalam mendukung Wasis menjadi kelas utama yang berkuasa menjalankan kekuasaan politik. Sedangkan Setia Hati Winongo menjadi Elite kelas dua dalam ranah desa menjadi oposisi pemerintahan desa. Tarik menarik kekuatan terjadi dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan desa. Unsur kekuatan keluarga sendiri juga terlihat muncul dalam internal Setia Hati Winongo. Sehingga terlihat adanya suatu kekuatan dukungan keluarga dalam lingkup Organisasi Pencak Silat.

[12] Suzzan Keller, Penguasa Dan Kelompok Elit (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995): Birhan Aditya Nadeyoga, "Peran Elite Organisasi Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Dalam Proses Politik Pemilihan Legislatif 2014 Di Kabupaten Nganjuk, *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4 No. 1, (Januari, 2014), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Sirkulasi Elite Politik Lokal Desa Padas

Dalam struktur kehidupan Desa Padas, faktor kebudayaan memang begitu dominan dalam memengaruhi kondisi sosial. Padas sendiri terletak diwilayah kebudayaan Mataraman. Dimana dalam pembedaan jenis wilayah dan karakter budayanya wilayah mataraman ini cenderung masih terpengaruh unsur kejawen yang kental dan penuh dengan nuansa politik kraton. Kebudayaan mataram seringkali dikaitkan dengan masyarakat abangan. Masyarakat Abangan ini adalah masyarakat yang terbangun oleh paradigma agama. Seringkali masyarakat abangan dilihat secara struktural belum bisa menjalankan syariat Islam dengan sempurna.[13]

Budaya mataram terbentuk oleh integrasi antara kebudayaan, agama dan budaya keraton yang berkolaborasi menjadi kesatuan sistem masyarakat. Budaya Jawa yang menjadi tolak ukur kehidupan masyarakatnya cenderung lebih kuat dalam memengaruhi karakter masyarakatnya. Unsur mistik Jawa masih terkonstruk mendasar dalam pola pikir masyarakat. Sehingga baik kebudayaan ataupun nilai agama dipandang dari sudut pandang budaya.

Atas dasar orientasi masyarakat Desa Padas dalam sudut pandang budaya tersebut. Mengindikasikan adanya masyarakat yang menjaga nilai *lokal wisdom* yang baik. Kondisi kehidupan sosial budaya

[13] Abdul Chalik," Islam Mataraman dan Orientasi Politiknya dalam Sejarah Pemilu di Indonesia," *Jurnal Islamica*, Vol. 5 No. 2, (Maret, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Desa Padas sesuai yang dijelaskan Kepala Desa Padas, sebagai berikut :

> "Masyarakat desa Padas masih memegang erat budaya Jawa, tradisi-tradisi Jawa masih dipakai seperti gotong-royong membuat rumah, kenduri, metil (Panen), tingkepan, piton-piton, bersih desa. Masyarakat juga senang dengan acara-acara gambyong (Tayub), wayangan, Tari Reog dan hiburan dangdut. Untuk hal-hal lain seperti memuja punden atau kuburan sudah tidak ada disini".[14]

Budaya yang digunakan sebagai acuan dasar kehidupan juga merambah pada sistem kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang terbentuk. Demikian juga Elite lokal atau pemegang kekuasaan sosial, terbentuk oleh hasil sebuah budaya. Pada masa awal kepemimpinan desa ini terlihat adanya suatu politik kekeluargaan yang dijalankan oleh keluarga Ponco Laksono. Dengan melakukan suatu distribusi kekuasaan secara efektif keluarga ini memonopoli kekuasaan desa. Kondisi ini sesuai dengan pernyataan Suzanna Keller, Elite berbeda dalam adanya distribusi kekuasaan yang di laksanakan oleh Elite. Tetapi di dalam perbedaan tersebut ada kesimpulan hal yang sama, contohnya adalah social goods yang tidak bisa di bagikan secara merata.[15] Sehingga adanya distribusi kekuasaan ke masing-masing anaknya adalah suatu strategi untuk membagi kekuatan. Tujuannya adalah agar anak-anaknya

---

[14] Wasis, *Wawancara*, Desa Padas, 21 Desember 2015.

[15] Suzzan Keller, Penguasa Dan Kelompok Elit (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995): Birhan Aditya Nadeyoga, "Peran Elite Organisasi Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Dalam Proses Politik Pemilihan Legislatif 2014 Di Kabupaten Nganjuk, *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4 No. 1, (Januari, 2014), 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa saling menjaga pilar-ilar tersebut untuk terus melanggengkan rezim desa.

Elite sebagai penguasa juga dapat melakukan monopoli kekuasaan yang memudahkan untuk tujuan-tujuan yang baik bagi mayoritas yang dipimpinnya, seperti menyejahterakan rakyat, peningkatan pendidikan, perluasan lapangan kerja, tetapi juga dapat di gunakan untuk hal yang tidak baik seperti mencari keuntungan sendiri untuk kepentingan individu dan kelompok.[16] Kondisi ini sesuai dengan masa pemerintahan desa yang tetap dikuasai oleh keluarga Ponco Laksono dengan tipe kepemimpinan yang tradisional. Konstelasi sosial-politik masyarakat merupakan peranan penting dalam melatarbelakangi dinamika politik yang ada. Sosok Ponco laksono yang memiliki sisi kewibawaan menjadikan anak turunnya memperoleh suatu kedudukan di struktur masyarakat Desa Padas.

Antara masyarakat dan keluarga Ponco Laksono membentuk sebuah relasi Patron-Client, dimana Ponco Laksono yang berperan ganda sebagai Elite lokal dan Elite politik. Sebagai Elite lokal yang menjadi panutan masyarakat atas sisi kharismatik yang dimilikinya menjadikannya mampu mengarahkan pola pikir masyarakat. Dalam artian lain, masyarakat membutuhkan sosok keluarga Ponco Laksono untuk memimpin desa.

[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi disisi lain anak turun Ponco Laksono yang menjadi kepala desa. Kondisinya malah bertolak belakang, dimana mereka harus tetap mempertahankan kepercayaan rakyat terhadap karakter keluarganya. Sehingga posisi *patron-clien* tersebut berbalik, aktor Elite lokal keluarga Ponco Laksono harus mengamankan eksistensinya. Hal tersebut dilakukan dengan mengamankan elektabilitas citra keluarganya pada stigma Masyarakat.

Dinamika politik lokal Desa Padas menuai sebuah perubahan pada masa pasca reformasi. Hal tersebut, dimana ada suatu perubahan sistem politik Indonesia. Tumbangnya rezim Orde Baru oleh adanya sebuah reformasi, mengakibatkan adanya sebuah jendela yang terbuka bagi angin demokrasi. Perubahan sistem politik negara menjadi demokrasi ini terwujud dalam sebuah otonomi daerah. Maksut dari adanya otonomi daerah ini untuk memberikan kewenangan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuannya adalah menciptakan suatu desentralisasi pembangunan daerah. Oleh karena pemisahan kekuasaan antara daerah dan pusat inilah memunculkan suatu pelaku politik baru didaerah yang dahulunya didominasi oleh penguasa yang dinaungi pemerintah Orde Baru.[17]

[17] Moch Nurhasim, *Konflik antar Elite politik lokal : dalam pemilihan kepala daerah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaku Politik baru yang ada di Desa Padas ini adalah pelaku budaya yang mulai muncul dalam ranah politik desa. Semenjak masa 1990 an, berkembanglah suatu budaya pencak silat. Ada beberapa pencak silat yang masuk ke desa Padas, diantaranya adalah Setia Hati Terate dan Setia Hati Winongo. Setelah masa reformasi bergulir kedua organisasi tersebut mampu menjelma menjadi organisasi yang lebih terbuka. Mereka terstruktur mulai dari pusat hingga sampai desa.

Elite organisasi silat ini muncul dalam dinamika politik desa bersama dengan Elite keluarga Ponco Laksono. Akibat adanya setting sosial yang tidak menguntungkan bagi keluarga Ponco Laksono membuat tidak ada sosok yang muncul dalam pemilihan kepala desa awal reformasi tersebut. Akhirnya kemenangan Heru Sumanto sebagai calon tunggal tidak dapat dihindarkan. Kemudian Heru Sumanto juga menggandeng Elite lokal silat dengan ikut menjadi anggota didalamnya. Elite Organisasi pencak silat ini semakin berkembang mengendalikan lingkungan sosial masyarakat. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Pareto dalam sirkulasi Elite, bahwasannya sirkulasi Elite terjadi dalam dua kategori, Pertama, pergantian terjadi di antara kelompok-kelompok yang memerintah sendiri. Kedua, pergantian terjadi di antara Elite dengan penduduk lainnya.[18]

[18] Moch Nurhasim, *Konflik antar Elite politik lokal : dalam pemilihan kepala daerah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Eksistensi kekuasaan keluarga mulai tergerus oleh perubahan sosial masyarakat. Munculnya pencak silat dalam wadah Organisasi ternyata mampu menarik simpatisan besar dari lingkungan. Utamanya adalah pemuda yang selalu aktif dalam pergerakan lingkungan desa. Fanatisme anggota pencak silat menimbulkan suatu loyalitas yang tinggi dari anggota pencak silat. Loyalitas inilah yang menjadi kunci kekuatan kelompok budaya pencak silat dalam dinamika politik lokal desa.

Sirkulasi Elite Lokal terjadi ketika ada hubungan interaksi antara kelompok penguasa politik, netral dan kelompok oposisi memainkan peranan politik lokal di desa. Pada masa pemilihan kepala Desa Padas tahun 2015 inilah baru terlihat adanya sebuah pertarungan antar Elite organisasi pencak silat. Ada dua kandidat calon kepala desa yaitu, Wasis sebagai calon incumben melawan Sayit calon yang muncul dari dusun Sempu. Wasis memiliki dukungan basis masa dari perguruan silat Setia Hati Terate Dusun Made, sedangkan Sayit memiliki basis dukungan masa dari Setia Hati Winongo Dusun Sempu.

Menurut Mosca, Pergantian Elite terjadi apabila Elite yang memerintah dianggap kehilangan kemampuannya dan orang luar di kelas tersebut menunjukkan kemampuan yang lebih baik, maka terdapat segala kemungkinan bahwa kelas yang berkuasa akan dijatuhkan digantikan oleh kelas penguasa yang baru.[19] Adanya rivalitas antara Setia Hati Terate dan Setia Hati Winongo ini menyebabkan adanya sebuah konflik.

[19] Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konflik disini atas dasar pertarungan Elite dalam memperebutkan kekuasaan desa. Konflik yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Padas tahun 2015 ini, terjadi antara Elite dengan Elite. Masing-masing Elite memiliki kekuatan yang berbeda, adanya pola dukungan ini seringkali menimbulkan fanatisme yang berlebihan.

Akibatnya memicu adanya gesekan konflik fisik. Ideologi sebuah organisasi mampu menciptakan sebuah loyalitas dan gerakan sosial anggotanya. Efektifitas organisasi kebudayaan tidak terpaku pada pembagian kerja atau sistem organisasi yang terstruktur. Melainkan pola kehidupan budaya yang bisa mengendalikan sistem sosial yang mampu menjadi tolak ukur perkembangan organisasi berbasis budaya pencak silat.

Perkembangan Elite lokal di Desa Padas dari masa ke masa memperlihatkan adanya suatu perubahan. Perubahan tersebut merupakan suatu bentuk adanya pengaruh kondisi sosial-politik. Konstelasi sosial politik memiliki peranan dalam memunculkan dinamika Elite lokal. Pada masa sebelum dan setelah kemerdekaan Elite lokal Desa Padas masih terhegemoni oleh adanya dogmatis kebudayaan lokal.

Meski sistem pemerintahan telah menunjukkan perubahan kearah demokratisasi. Akan tetapi perubahan kondisi sosial politik tersebut tidak menggeser paradigma budaya dalam memengaruhi tatanan politik kekuasaan daerah. Konsep ini kemudian disebut dengan neo-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

patrimonialisme.[20] Atas dasar acuan tersebut mengindikasikan sistem pemerintahan Desa Padas yang masih terkonsentrasi pada pola budaya. Kontribusi keluarga Ponco Laksono sangat leluasa dalam memanfaatkan kekuasaannya untuk mengintegrasikan sistem kebudayaan keranah politik desa.

Setelah adanya Era Reformasi perubahan sistem politik ternyata juga dimanfaatkan oleh aktor-aktor lain yang mencoba masuk ke ranah politik Desa Padas. Pelaku politik baru ini memiliki basis kekuatan pada orientasi kelompok budaya pencak silat. Struktur masyarakat mataraman yang mengedepankan budaya sebagai alat dalam memandang perubahan politik sangat partisipatif menanggapi budaya pencak silat. Sehingga mampu merubah dinamika politik desa dari oligarki keluarga menuju elite berbasis budaya pencak silat.

Sistem politik yang diterapkan penguasa seringkali membentuk budaya politik masyarakat. Dogmatis masa kekuasaan kerajaan sebagai bagian sejarah panjang pembentuk anomi budaya masyarakat Jawa begitu akuntabel membentuk paradigma masyarakat. Dalam era demokrasi sekalipun para aktor politik selalu berorientasi pada arah pemikiran masyarakat. Sehingga relasi antara patron-clien yang dahulunya terjalin antara aktor penguasa dengan masyarakat sekarang berbalik arah. Sistem demokrasi yang menempatkan rakyat pada

[20] Edisius Riyadi Terre, *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya selama Abad 21 hingga Era Reformasi/Tod Jones* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan tertinggi lewat legitimasi suara politiknya, menjadikan aktor politik berbalik mengikuti paradigma berpikir masyarakat. Namun perkembangan sistem politik tersebut masih saja di pahami dari sudut pandang budaya.

B. Peran Organisasi Pencak Silat dalam Dinamika Pemilihan Kepala Desa Padas Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Tahun 2015.

Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada ranah Pemilihan Kepala Desa Padas Tahun 2015. Dinamika aktor budaya pencak silat yang berkontribusi dalam masa dukungan kontestan Pemilu mewarnai proses pencalonan kepala desa. Basis kebudayaan pencak silat yang telah berkembang menjadi wadah sebuah gerakan organisasi mengindikasikan adanya perubahan fungsi kelompok budaya.

Hal ini selaras dengan tampilnya Setia Hati Winongo dan Setia Hati Terate menjadi basis sumber kekuatan politik. Kualitas suatu kelompok tidak hanya terlihat dari ukuran rentang waktu perjalanan pencak silat, namun integritas anggota sangat penting dalam kemajuan organisasi tersebut. Adanya individualitas aktor dalam sebuah organisasi seringkali menimbulkan sebuah perpecahan. Faktor kepentingan menjadi pemicu utama adanya konflik yang bersifat internal. Demikian pula dalam ranah politik, efektifitas ikatan primordial pencak silat menjadi acuan dalam keberhasilannya menghimpun masa anggotanya.

Peran memiliki arti sebagai suatu harapan-harapan yang dilakukan oleh seseorang atas dasar status sosialnya dimasyarakat.[21] Peran dan kedudukan disini ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dalam peran tersebut akan

[21] Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. RaJawali, 1990), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk suatu citra atau eksistensi seseorang dalam kehidupan sosial. Sedangkan dari segi kedudukan sosial orang tersebut memiliki peran sesuai fungsinya. Adanya peran akan membangun suatu interaksi dalam sistem sosial. Setiap orang memiliki perannya sendiri begitu juga antara peran dan kedudukannya saling memengaruhi. Kedudukan menjadi suatu gambaran status sosial yang atas dasar sumberdaya yang dimilikinya. Pada proses dinamika Pemilihan Kepala Desa Padas ini, terlihat suatu peran yang dimainkan Elite lokal dan Elite politik yang saling memengaruhi. Mereka melakukan suatu tugas sesuai dengan fungsi kedudukannya masing-masing dengan membangun interaksi. Elite lokal merupakan kekuasaan atas kehidupan sosial. Elite lokal dalam Pemilihan Kepala Desa Padas tahun 2015 ini menunjukkan peran organisasi pencak silat dalam memainkan fungsinya.

Organisasi pencak silat ini memiliki suatu kendali sosial lewat paradigma budaya yang berkembang di masyarakat. Konstruksi pemikiran budaya tradisional Jawa menyebabkan keterbelakangan cara berpikir. Esensi budaya masih tajam dalam memengaruhi pemikiran masyarakat. Dengan kuatnya budaya dalam pola pikir masyarakat, akhirnya pencak silat mampu menghegemoni kendali sosial. Kendali tersebut didasarkan atas stigma status pencak silat dalam masyarakat. Status pendekar yang disandang seseorang akan memengaruhi kedudukannya dalam stratifikasi sosial masyarakat Desa Padas.

Sosok pendekar dikenal dengan orang yang telah mampu menuntaskan latihan fisik dan mentalnya selama belajar ilmu kanuragan. Oleh sebab itu statusnya memiliki peran penting, seringkali diagungkan oleh masyarakat. Atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar posisinya yang menguntungkan tersebut kelompok pendekar ini mencoba menanamkan citra positif dalam kehidupan sehari-harinya. Acuan budaya dalam kegemaran masyarakat menjadikannya cepat pouler dan berkembang secara signifikan. Ketika organisasi encak silat ini mampu mendominasi sistem sosial dengan mengakomodasi pemuda sebagai masyarakat yang produktif. Pencak silat ini mulai memainkan perannya dalam mencapai tujuan-tujuan kelompok. Adanya pencak silat sebagai karakter sebuah lingkungan akan memengaruhi eksistensi pencak silat tersebut. Sehingga atas dasar perilaku sosialnya pencak silat ini terus melakukan perkembangan organisasinya lewat basis-basis sosial lainnya. Terutama bidang politik, menjadi sasaran pencak silat. Aktor organisasi pencak silat memiliki peranan penting dalam memobilisasi kekuatan masa. Para pelaku organisasi ini menciptakan suatu perubahan arah geraknya kedalam bidang politik.

Elite pencak silat ini memperlihatkan perannya dengan bersaing ke dalam ranah politik desa. Identitas suatu lingkungan juga menjadi faktor penentu arah tindakan tersebut. Dengan memobilisasi masa ke ranah politik tersebut aktor politik ini ingin memberikan suatu manfaat pada kelompoknya dan lingkungannya lewat status sosialnya. Peran anggota silat disini adalah memaknai segala keputusan kelompok lewat rasa loyalitas. Demikian dengan adanya rasa solidaritas yang tinggi akan menciptakan suatu interaksi yang sistematis antara fungsi aktor pencak silat dalam kehidupan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Patrimonialisme Elite Organisasi Pencak Silat dalam Dinamika Pemilihan Kepala Desa Padas Tahun 2015**

Dalam Pemilihan Kepala Desa Padas Tahun 2015, memperlihatkan adanya suatu iklim politik baru yang mewarnai dinamika persaingan tersebut. Dominasi gerakan sosial berbasis budaya berupaya masuk dan ikut dalam memainkan dinamika politik yang ada. Berbeda dengan sebelumnya dimana di sebuah desa isu dinasti atau politik kekeluargaan selalu mewarnai kekuasaan desa. Di Desa Padas kenyataannya berbeda ketika terjadi perubahan sistem sosial mengakibatkan berubahnya tatanan pola kekuatan politik. Setiap perubahan sosial pasti akan menimbulkan sebuah bentuk perubahan. Setelah era reformasi banyak kelompok yang mulai muncul sebagai pelaku baru dalam petarungan Elite lokal.

Di Desa Padas, setelah adanya era reformasi tersebut juga membawa sebuah perubahan. Dimana munculnya kelompok organisasi budaya pencak silat dalam dinamika sosial desa. perkembangan pencak silat yang signifikan mengakibatkan adanya sebuah persaingan kekuatan. Kekuatan yang diartikan bukanlah bersifat supranatural, namun kekuatan masa anggota. Pencak silat dalam menjaga eksistensinya membutuhkan suatu regenerasi untuk melanjutkan kehidupan budaya tersebut. Akibat jumlah pertumbuhan anggota pencak silat yang berbeda antara masing-masing organisasi, akhirnya menimbulkan suatu konflik.

Konflik tersebut lambat laun memaksa lingkungan desa untuk larut dalam identitas pencak silat. Sehingga identitas pencak silat tercermin melalui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karakter lingkungannya. Karena basis dukungan anggotanya yang begitu besar pencak silat ini bermanuver untuk menguasai kekuasaan pemerintahan desa. Dengan memiliki wakil dalam pemerintahan desa, menjadikan suatu rasa kebanggaan tersendiri bagi semua anggota. Demikian pula jika kalah dalam persaingan politik desa, citra suatu organisasi cenderung memudar. Hal ini karena kekuatannya berbasis masa, ketika mengikuti konstelasi pemilu yang dibutuhkan adalah basis suara masa pendukung. Terdapat dua pencak silat yang dikembangkan oleh penduduk Desa Padas.

Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate dan Persaudaraan Setia Hati Winongo menjadi acuan budaya silat Desa Padas. Kedua pencak silat ini dilestarikan di dua tempat yang berbeda. Setia Hati Terate berada di lingkungan dusun Made dan Petung, sedangkan Setia Hati Winongo berada di Dusun Sempu. Keduanya menjadi organisasi yang mengakomodasi seluruh elemen pemuda. Kekuasaan pemuda sangat dominan jika melihat jumlah penduduk Desa Padas. Sehingga kelompok budaya pencak silat ini berubah menjadi Elite lokal di Desa Padas. Keberadaannya ternyata memiliki peran yang signifikan dalam masa pemilihan kepala Desa Padas 2015.

Menurut Crouch Patrimornial mengacu pada hubungan *patron-clien* yang terstruktur secara vertikal. Hubungan tersebut merupakan sebuah persaingan dalam meraih sumber daya yang ditempatkan dalam oposisi pemerintahan modern.[22] Pencak silat dalam perkembangan zaman masih

[22] Edisius Riyadi Terre, *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya selama Abad 21 hingga Era Reformasi/Tod Jones* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat dominan dalam masyarakat tradisional di Indonesia. Di Madiun, yang notabenenya masyarakat mataraman sangat menggandrungi budaya. Pada era modernisasi ini kelompok-kelompok budaya semakin berkembang pesat sampai ke pelosok daerah.

Adanya sifat etnosentrisme golongan menyebabkan adanya suatu gejolak sosial antara kelompok budaya pencak silat. Gejolak tersebut melahirkan konflik yang berkepanjangan secara mengakar. Konflik yang terus terjadi merambah ke sektor-sektor publik dalam penguasaan sumber daya sosial. Di Desa Padas konflik antar organisasi pencak silat ini terus berdialektika pada basis masa Setia Hati Terate di Dusun Made dan Setia Hati Winongo di Dusun Sempu. Sentimen budaya menjadikan suatu fanatisme yang berlebihan sehingga saling memunculkan pola dukung-mendukung.

Dengan tampilnya para aktor pencak silat dalam struktur Pemerintahan Desa Padas, konflik pun juga ikut masuk ke ranah persaingan sumber daya politik. Sistem budaya yang tergeneralisasi ke dalam wadah organisasi merupakan proses aktualisasi budaya dalam era modern. Disinilah sisi patrimonialistik Desa Padas terungkap. Sentimen budaya saling memberikan pengaruhnya lewat konstelasi pemilihan umum di desa. Organisas pencak silat ini ingin menguasai sistem pemerintahan desa.

Faktor eksistensi menjadi suatu nilai yang diperjuangkan. Martabat sebuah organisasi pencak silat sangat dipertaruhkan dalam persaingan di bidang politik. Hal ini karena tradisionalitas masyarakat yang masih menganggap budaya sebagai pedoman berpikir. Selain itu persaingan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga menunjukkan faktor kekuatan dari segi loyalitas dan integritas setiap pencak silat dalam memobilisasi masa konstituennya. Sehingga kalah dan menang dalam persaingan dalam politik berpengaruh terhadap harga diri atau citra organisasi pencak silat tersebut.

Sistem patrimonial ini sudah ada sejak zaman kekuasaan keluarga Ponco Laksono. Perbedaannya kekuasaan elektabilitas pencak silat ini cenderung lebih solid dan terintegrasi dengan baik. Pencak silat ini ingin membangun corak kebudayaan silatnya di struktur pemerintahan Desa Padas.

a) Dinamika Elite Persaudaraan Setia Hati Terate Rayon Padas

Proses masuknya Persaudaraan Setia Hati Terate melewati individu masyarakat Desa Padas sendiri. Seperti yang dituturkan Wasis, bahwasannya ada dua Pencak Silat yang masuk Desa Padas yaitu, Setia Hati Terate dan Setia Hati Winongo. Setia Hati Terate masuk sekitar tahun 1990an dibawa oleh Sunaji warga Dusun Made Rt 1. Sunaji ini berlatih Setia Hati Terate di Desa Prambon dan Segulung.[23] Setia Hati Terate ini memiliki wilayah cakupan yang luas di Desa Padas. Dimana dari 10 Rt, 6 Rt diantaranya mengikuti ajaran pencak silat ini. Keenam Rt tersebut meliputi Rt1-5 dan 10.

Sistem yang dijalankan Setia Hati Terate ini berbasis seni beladiri. Dalam ajaran Setia Hati Terate, ada lima tujuan yang menjadi dasar Setia Hati Terate, Membentuk Manusia yang berbudi pekerti luhur tahu benar

[23] Wasis, *Wawancara*, Desa Padas, 21 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan salah, Mencari persaudaraan yang kekal dan abadi, Beladiri, Olahraga, Kerohanian.[24]

Dalam melakukan perluasan wilayahnya, Setia Hati Terate membentuk sebuah organisasi untuk mengordinir anggotanya disetiap wilayah. Bentuk organisasi disini bersifat Non-Profit, yang arah tujuannya untuk kepentingan anggota dan masyarakat. Struktur organisasi Setia Hati Terate berjenjang sesuai tingkatan daerah. Disetiap tahap memiliki fungsi untuk mengordinir kepengurusan dibawahnya. Ada empat tingkatan kepengerusan Setia Hati Terate, meliputi Tingkat Pusat yang berada di Madiun, Tingkat cabang di kabupaten/kota, , Tingkat Ranting disetiap kecamatan, Tingkat Rayon yang berada di desa.[25]

Disetiap kepengurusan tersebut, mampu mengakomodasi seluruh anggotanya. Dalam praktiknya organisasi tersebut hanya bersifat struktural belum sesuai dengan organisasi formal yang sesungguhnya. Karena berlatarbelakangkan pencak silat, organisasi ini terkesan lebih menonjolkan aspek budaya dalam kegiatan sehari-harinya.

Setia Hati terate Rayon Padas diketuai oleh Sumaji warga Rt 2 Dusun Made. Perannya menjadi ketua Setia Hati Terate Rayon Padas karena partisipasinya yang aktif dalam mengurusi anggotanya. Kepemimpinannya tidak hanya disandarkan pada peran aktifnya,

[24] Persaudaraan Setia Hati Terate, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, Hasil Mubes VI, (Solo, 2000), 8.
[25] Persaudaraan Setia Hati Terate, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, Hasil Mubes VI, (Solo, 2000), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan karena dahulunya juga jago silat dan selalu tampil ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan kepemudaan Dusun Made. Tipe masyarakat pegunungan yang cenderung berpikiran tradisional, masih mengedepankan eksistensi adanya keahlian dalam bidang silat. Kekuatan dan mistis masih menjadi suatu acuan masyarakat. Oleh karena potensi silat dan peran aktifnya selama ini menjadikannya mempunyai persepsi baik dalam mengelola organisasi tersebut.

Dalam proses pemilihan kepala desa pada tahun 2015 di Desa Padas ini. Peran Setia Hati Terate sangat terlihat dalam mewarnai percaturan politik desa. Setia Hati Terate menjadi basis dukungan politik calon No. urut 1 Wasis. Sesuai dengan penuturan Ketua Rayon Setia Hati Terate Padas sebagai berikut :

> "Kami Warga SH Terate Padas memang mendukung Mas Wasis sebagai kepala desa Padas waktu itu. Mas Wasis sendiri juga anggota lama SH Terate Rayon Padas. Pada masa pencalonan diadakan musyawarah oleh seluruh anggota Rayon berkumpul, kemudian Mas Wasis meminta dukungan dan akhirnya kami sepakat untuk warga SH Terate Rayon Padas mendukung Mas Wasis".[26]

Sistem kebudayaan primordial yang masih nampak dalam konstruksi sosial masyararakat, menjadikan isu budaya begitu sangat dominan dalam memengaruhi kehidupan masyarakat. Di Desa Padas kebudayaan pencak silat menjadi sebuah paradigma budaya dalam menciptakan karakter lingkungan. Ikatan primordial anggota pencak silat menimbulkan suatu emosional para anggota kelompoknya. Sifat emosional

[26] Sumaji, *Wawancara*, Desa Padas, 23 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini cenderung memicu fanatisme terhadap kelompok ideologi budaya. Sehingga adanya ikatan anggota pencak silat tersebut, menciptakan sebuah solidaritas yang kuat dalam hal etnosentrisme kelompok. Ikatan solidaritas yang tinggi ini akibat adanya rasa persamaan ideologi atau budaya kelompok. Ikatan tersebut terbentuk ketika mereka menimba ilmu ajaran Setia Hati Terate semasa menjadi siswa.

Dilihat dari segi konsep *Patronase* politik, memperlihatkan adanya sebuah hubungan interaksi antara Wasis calon Kepala Desa Padas dengan Sumaji beserta anggota Setia Hati Terate Padas. Wasis memainkan perannya menjadi pelaku politik yang terpengaruh dan juga memengaruhi struktur atau organisasi Setia Hati Terate. Dalam sistem patrimonial menurut Crouch, hubungan antara budaya dengan sistem pemerintahan mengahsilkan relasi *patron* dan *clien* atas persaingan sumberdaya politik.[27] Hal ini sesuai dengan yang terjadi pada internal Setia Hati Terate Rayon Padas. Dimana dengan adanya struktur kelembagaan Setia Hati Terate. Secara sadar Wasis adalah anggota kelompok tersebut. oleh karenanya Wasis terbatas dalam hal kekuasaan organisasi tersebut. Karena organisasi dijalankan oleh sistem. Namun kekuatan politik Wasis dalam percaturan Pemerintahan Desa Padas sangat menguntungkan bagi pihak Organisasi pencak silat.

[27] Edisius Riyadi Terre, *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya selama Abad 21 hingga Era Reformasi/Tod Jones* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem yang ada dalam Setia Hati Terate memang tidak tersistematis dengan baik seperti organisasi berbasis sosial-ekonomi. Namun adanya struktur ini mampu menggerakkan organ-organ yang berada dalam sistem tersebut. Sistem kebudayaan lebih bersifat tradisional meski lembaganya modern. Pengaruh primordial konstruksi budaya Jawa masih memiliki pengaruh dalam kelompok tersebut. Kepemimpinan yang bersifat tradisional menjadi acuan dalam menggerakkan masyarakat.

Sosok Sumaji memiliki peranan penting dalam dinamika pencak silat di Padas. Perannya yang begitu sentral ketika selalu aktif dan hadir pada setiap permasalahan pemuda. Oleh karena kontribusinya itu masyarakat menjadikannya ketua rayon Setia Hati Terate. Faktor kebudayaan menempatkan identitas masyarakat dalam lingkungan melalui status sosialnya.

Identitas Pendekar silat menjadi sebuah kehormatan yang memiliki status sosial di masyarakat. Karena perjuangan untuk menjadi pendekar khususnya Setia Hati Terate terkesan tidak mudah. Prosesnya melalui sistem latihan fisik minim bisa ditempuh dalam waktu satu tahun dengan bertahap. Selain itu juga dengan adanya nilai-nilai kerohanian dan ajaran etika kehidupan Jawa menjadikannya memiliki predikat baik dimata masyarakat. Sehingga lingkungan ini dapat terkendali oleh organisasi pencak silat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wasis disini merupakan pihak *patron* yang memiliki sumber kekuasaan politik. Sedangkan Sumaji merupakan pihak *clien* yang menggerakkan organisasi Setia Hati Terate. Setia Hati Terate membutuhkan suatu figur dari anggotanya untuk maju dalam persaingan politik Desa Padas. Hal tersebut didasarkan pada persaingan pencak silat dalam mempertahan kekuasaan dan eksistensi pencak silat tersebut dalam desa. Sedangkan Wasis merupakan tokoh politik yang berlatarbelakangkan anggota Setia Hati Terate. Wasis membutuhkan suatu basis dukungan masa pencak silat untuk memenagkan kontestasi Pemilihan Kepala Desa Padas 2015. Sehingga antara keduanya membentuk suatu interaksi yang saling memengaruhi.

Kedua aktor ini memiliki kepentingan yang bisa saling terlengkapi jika keduanya berkolaborasi. Tejadilah relasi *patron* dan *clien* antara Wasis dan Setia Hati Terate. Sumaji sebagai figur sesepuh pendekar memiliki peran dalam mengarahkan masa anggotanya untuk memberikan dukungannya terhadap Wasis. Tujuan yang diinginkan Setia Hati Terate sendiri dengan terpilihnya Wasis, maka eksistensi dan citranya akan memengaruhi elektabilitasnya di masyarakat.

Sumaji sebagai pihak clien melakukan suatu kontribusi aktif dengan melakukan langkah persuasif untuk mengarahkan dukungan seluruh anggota Setia Hati Terate Padas kepada Wasis. Langkah yang dilakukan Sumaji menggunakan kekuasaannya sebagai Ketua Rayon untuk mengkonsolidasi anggotanya. Konsolidasi tersebut juga memiliki strategi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menggalang dukungan dengan aktor-aktor di lingkupnya masing-masing. Di Dusun Petung Sumaji ini menjalin kerjasama dengan Darno sebagai Wakil Rayon untuk mengamankan suara dusun tersebut. adanya ikatan solidaritas tinggi atas dasar primordialisme dapat menumbuhkan kesadaran untuk melakukan integritas yang tinggi.

Sistem budaya pencak silat yang menekankan pada kepatuhan terhadap sosok yang lebih sepuh menjadi suatu alat dalam mengarahkan konstituennya. Sehingga karakter budaya melapisi elemen struktur desa berdialektika secara interaktif lewat relasi patron-clien.

2. Dinamika Elite Persaudaraan Setia Hati Winongo Rayon Padas

Persaudaraan Setia Hati Winongo seperti yang terlihat dari sejarah singkatnya merupakan terusan dari Sedulur Tunggal Kecer yang didirikan Ki Ngabehi Surodiwiryo. Proses perkembangannya terkesan lebih ekslusif dibanding Setia Hati Terate. Hal ini dikarenakan Pencak silat ini pada masa penjajahan terbelenggu oleh kekuasaan pemerintahan kolonial. Sehingga ajarannya hanya terbatas pada kelompok-kelompok masyarakat yang berstatus sosial tinggi. Basis masanya terkesan ekslusif mulai dari bangsawan, priyayi dan para pejabat. Sehingga dominasi terbesarnya berada di perkotaan Madiun.

Setia Hati Winongo masuk ke Desa Padas sekitar tahun 1998 an. Proses masuknya juga diakibatkan oleh kondisi sosial yang melatarbelakanginya. Dimana dulunya ada beberapa penduduk Dusun Sempu yang ikut latihan Setia Hati terate di Dusun Made. Namun mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak yang keluar karena tidak kuat mengikuti latihan fisik Setia Hati Terate yang keras. Hal ini diseperti yang disampaikan oleh Supri, sebagai berikut :

> "Iya, dulu kakak saya dan dua temannya orang Sempu sisni belajar SH Terate ke Made, kemudian mereka berhenti latihan karena tidak kuat karena kekerasan fisiknya. Setelah itu saya dan orang-orang sini punya inisiatif membuka SH Winongo yang saya pelajari dari Pagotan sana"[28].

Setelah pencak silat ini berkembang di Sempu ternyata mengakibatkan adanya sentimen ideologi kelompok. Dalam maslasah ini adalah identitas kelompok budaya silat. Perbedaan Setia Hati Terate dan Setia Hati Winongo dalam strategi penjaringan anggota dan latarbelakang sejarah yang selalu berkonflik. Dampaknya juga berimbas ke Desa Padas, dimana banyak terjadi penyerangan yang dilakukan oleh kelompok pencak silat lainnya. Ikatan solidaritas kelompok yang menciptakan emosional berakibat pada fanatisme yang membabi buta. Fanatisme ideologi kelompok ini seringkali menimbulkan etnosentrisme kelompok yang tidak toleran pada kelompok lain. Konflik horisontal tidak terhindarkan dalam sentimen budaya silat ini.

Supri adalah sesepuh Setia Hati Winongo Di Sempu, dalam struktur Setia Hati Winongo tidak ada rincian organisasi secara jelas. Sehingga kelompok-kelompok ini terorganisir secara tradisional, mengandalkan figur-figur sesepuh ataupun pendekar yang dominan dalam menguasai silat juga peran aktifnya. Tidak adanya kejelasan struktur ini akibat

[28] Sumaji, *Wawancara*, Desa Padas, 23 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecenderungan Setia Hati Winongo yang kaku terhadap pembaruan jaman. Dimana pencak silat ini terus melestarikan kebudayaan tradisionalnya untuk tetap mempertahankan ajaran lamanya.

Kondisi tersebut tercermin dengan tidak adanya cabang ataupun kepengurusan Setia Hati Winongo diluar Madiun. Akibatnya segala urusan pencak silat selalu dilakukan di pusat Madiun. Hal inilah yang mengakibatkan Setia Hati Winongo tidak berkembang dengan pesat. Sehingga dalam persaingannya dengan Setia Hati Terate banyak manuver yang dilakukan Setia Hati Winongo. Salah satunya melakukan suatu pengesahan terlebih dahulu sebelum adanya pelatihan bagi anggota baru.

Hal ini diasumsikan dengan mengikat sumpah bersama menjadi anngota Setia Hati Winongo akan melahirkan suatu loyalitas dan kesetiannya terhadap golongan tersebut. Ini adalah salah satu strategi untuk meraih anngota dan memperluas basis kekuasaan di penjuru daerah. Berbeda dengan Setia Hati Terate yang terlalu ketat dalam urusan pendidikan fisiknya yang terkesan tidak ada yang instan, dimana untuk menjadi warga minim harus mengikuti latihan selama setahun.

Pada masa Pemilihan Kepala Desa Padas tahun 2015 kemarin, terlihat peran Setia Hati Winongo dalam melakukan dukungan politik. Sesuai yang dipaparkan Supri bahwasannya Setia Hati Winongo Dusun Sempu memberikan arah dukungannya kepada calon nomor urut 2 yaitu Sayit. Sayit sendiri adalah warga Setia Hati Winongo dusun Sempu.[29]

[29] Supri, *Wawancara*, Desa Padas, 23 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena adanya sentimen ideologi yang menciptakan ikatan solidaritas yang tinggi. Solidaritas ini menciptakan suatu ikatan primordial yang berbasis etnis budaya pencak silat. Ikatan ini kemudian memunculkan suatu emosional yang berujung pada fanatisme untuk mendukung kandidat yang memiliki latarbelakang ideologi kelompok yang sama.

Sayit dan Supri memiliki peranan penting dalam proses dinamika politik di dusun Sempu. Pasalnya tidak ada sistem yang formal dalam kelembagaan Setia Hati Winongo, sehingga sosok figur menjadi acuan dalam patokan sosial anggotanya. Supri merupakan aktor lama dalam dunia Setia Hati Winongo di Sempu. Kontribusinya terkesan luar biasanya pada aspek kepemudaan terutama bidang budaya pencak silat. Supri selalu menjadi motor penggerak pemuda serta pelopor kemajuan Setia Hati Winongo di Sempu. Sayit sendiri juga merupakan warga sepuh anggota Setia Hati Winongo Sempu.

Dalam kajian konsep strukturasi di basis pencak silat Setia Hati Winongo ini ingin melihat tarik menarik antara Supri dan Sayit. Tarik menarik tersebut dalam hal pengaruhnya di struktur Setia Hati Winongo. Kondisi ini karena adanya perpecahan dalam internal kelompok tersebut. Sesuai dengan yang dituturkan Supri, bahwasannya ada masalah individu antara dirinya dan Sayit. Masalah tersebut menyangkut kontribusi Supri dalam Setia Hati Winongo yang cenderung di labelkan buruk. Pelabelan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut mencirikan Supri yang menjadi biang masalah dalam kenakalan dan konflik yang selalu melibatkan pemuda Sempu.[30]

Sehingga ketika Sayit mencalonkan sebagai Kepala Desa, Supri tidak mendukungnya. Disini para pelaku atau agen menjadikan Setia Hati Terate sebagai sumber kekuatan. Dimana dengan struktur lembaga yang tidak organisir yang baik, menyebabkan adanya tarik menarik kekuatan yang bersifat internal. Supri melakukan suatu persuasi untuk tidak memilih Sayit kepada anak didiknya yang selama ini selalu dilindunginya. Sedangkan Sayit juga melakukan mobilisasi masa dengan memanfaatkan ikatan primordial yang ada dalam kubu Setia Hati Winongo tersebut dengan harapan sebuah perubahan.

Supri mempertankan posisinya terhadap perilaku aktor baru dengan cara membelot dari arah persepsi anggota kelompok tersebut. Pertarungan internal disini sebagai dampak dari mempertahankan dan merebutkan status kedudukan dalam kelompok tersebut. Sedangkan Sayit ingin memanfaatkan sumber daya kelompok tersebut untuk tujuan menguasai basis politik.

Keduanya saling tarik menarik kekuatan masa dari struktur Setia Hati Winongo. Mereka saling melakukan suatu sistem Struktur Dominasi, dimana Supri menganggap dirinya punya kuasa atas kontribusinya selama ini kepada kelompok. Sayit sendiri juga memaksa anggota silat

[30] Supri, *Wawancara*, Desa Padas, 23 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendukungnya atas dasar ingin memajukan kelompok silat tersebut dengan perluasan basis kekuasaan politik.

Akhirnya Supri hanya mendapatkan segilintir orang anak didiknya yang mengikutinya untuk tidak memilih Sayit. Sedangkan Sayit sebaliknya sebagai pelaku baru mampu memanfaatkan kondisi sosial untuk meraih simpatisan dari struktur kelompok budaya. Sayit berperan sebagai patron dengan cara memberikan harapan untuk sebuah perubahan yang lebih baik kepada clien. Setia Hati Winongo Rayon Padas disini berperan sebagai clien yang membutuhkan suatu sosok dalam memperbaiki kelangsungan dan perkembangan Setia Hati Winongo yang stagnan. Oleh karenanya sosok Sayit mengalahkan karakter Supri yang telah lama berkontribusi di Setia Hati Winongo. Hal ini memperlihatkan bahwasannya tolak ukur relasi *patron* dan *clien* terfokus pada kepentingan yang didapatkan masing-masing aktor.

Pola tarik menarik tersebut akibatnya menjadikan perpecahan dalam struktur organisasi tersebut. Pelaku memainkan perannya dalam ranah konstruksi budaya yang termanifestasi dalam wujud budaya pencak silat. Adanya indivdualitas kepentingan pelaku sosial menyebabkan adanya tarik menarik kekuatan menggunakan sumber daya struktur budaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Dinamika Konflik Elite Lokal Pencak Silat dalam Pemilihan Kepala Desa Padas tahun 2015

Dalam pola strategi politik Pemilihan Kepala Desa Padas tahun 2015 ini, memperlihatkan adanya suatu penggolongan Elite. Dimana Elite yang terbentuk oleh dua karakter orientasi. Yaitu Elite yang bersifat sosial dan Elite yang bersifat pemerintahan. Dalam kajian Elite lokal, ada pengkategorian Elite berdasarkan orientasi basisnya.

a) Elite politik lokal yang merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif atau legislative yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal.
b) Elite non-politik lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain di lingkup masyrakat.[31]

Elite Politik Lokal di Desa Padas ini adalah masing-masing kontestan pemilu, sedangkan Elite non-Lokal adalah aktor yang memiliki kekuasaan di organisasi pencak silat. Antara kedua calon tersebut membentuk suatu hubungan interaksi komunikatif dalam membangun dukungan masa. Adanya rivalitas dua pencak silat ini mengindikasikan sebuah persaingan dalam pola dukungannya. Mekanisme pencarian dukungan lewat organisasi pencak silat ini, sebenarnya terletak pada kebudayaan yang mencerminkan identitas lingkungan. Sehingga

[31] Moch Nurhasim, *Konflik antar Elite politik lokal : dalam pemilihan kepala daerah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor martabat sebuah organisasi pencak silat yang menjadi identitas lingkungan dipertaruhkan. Oleh karena adanya banyak kepentingan tersebut muncullah suatu konflik yang bersifat horisontal.

Konflik tersebut terjadi disebabkan oleh dua faktor. Pertama, dari segi pengertiannya, konflik diartikan sebagai pertentangan yang terbuka antar kekuatan-kekuatan politik yang memperebutkan kekuasaan sehingga dapat dilihat oleh orang luar. Kedua, sasaran-sasaran yang tidak sejalan sesunguhnya menunjukkan adanya perbedaan kepentingan.[32] Konflik Elite lokal Desa Padas ini sesungguhnya adalah permasalahan Elite organisasi pencak silatnya sendiri yang memiliki sejarah kelam. Dimana konflik antar perguruan silat dimadiun ini sudah mendarah daging, seperti yang diungkapkan Bapak Sumaji, sebagai berikut :

> "Dimadiun sendirikan banyak aliran pencak silat yang cenderung sering terjadi bentrokan antar pencak silat, biasanya yang sering terjadi di Madiun itu antara SH Terate dan SH Winongo".[33]

Konflik yang terjadi tidak hanya terdapat ditingkat pusat saja, adanya perbedaan jenis pencak silat juga mampu memicu adanya konflik. Seperti yang diungkapkan oleh Supri ketua Setia Hati Winongo Dusun Sempu sebagai berikut :

> "Sempu ini dulu pernah diserang oleh banyak desa, kami sedusun menyelamatkan diri semua. Semua itu waktu tahun 2000an, sedang panas-panasnya konflik perguruan silat. Apalagi menjelang bulan Syuro itu pasti terjadi kericuhan dimana-dimana."[34]

---

[32]Ibid., 14.
[33] Supri, *Wawancara*, Desa Padas, 23 Desember 2015.
[34] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika basis dukungan masa antar calon di Desa Padas mulai melakukan mobilisasi sosialnya. Organisasi pencak silat ini memperlihatkan ketegangannya. Dimana unsur egoistik antar anggota silat menciptakan suatu fanatisme kelompok. Namun dalam kelompok sendiri juga sering terjadi konflik yang bersifat internal. Menurut Pareto sirkulasi Elite terjadi dalam dua kategori, Pertama, pergantian terjadi di antara kelompok-kelompok yang memerintah sendiri. Kedua, pergantian terjadi di antara Elite dengan penduduk lainnya. Pergantian model kedua ini bisa berupa pemasukan yang terdiri atas dua hal yaitu :

a) Individu-individu dari lapisan yang berbeda ke dalam kelompok Elite yang sudah ada
b) Individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok Elite baru masuk ke dalam kancah perebutan kekuasaan dengan Elite yang sudah ada.[35]

Dalam kasus ini pernah terjadi suatu benturan kepentingan antara internal Elite Setia hati Winongo. Akibatnya adalah adanya suatu perpecahan, indikasinya adalah persaingan dalam internal Setia Hati Winongo Rayon Sempu sendiri. Yang mengakibatkan perseteruan Calon Sayit dengan ketua Setia Hati Winongo Supri. Adanya perpecahan ini menimbulkan suatu dampak, dimana konflik seringkali diiringi dengan penggunaan sebuah alat. Duveger menjelaskan bahwa dalam konflik-konflik politik sejumlah alat digunakan seperti organisasi, dan jumlah, uang (kekayaan), sistem, militer, kekerasan fisik dan lain sebagainya.[36]

---

[35] Moch Nurhasim, *Konflik antar Elite politik lokal : dalam pemilihan kepala daerah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 15
[36] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Besaran konflik ini terjadi menjelang malam pemilihan kepala desa dilaksanakan. Dimana antara loyalitas dan martabat Supri dipertaruhkan dalam sebuah organisasi Setia Hati Winongo. Pasalnya Supri adalah ketua pemuda, seorang pemimin Elite, namun para anggotanya tidak memperdulikannya dengan alasan kesetiaannya pada organisasi. Sedangkan Supri harus berseteru dengan dirinya sendiri ketika loyalitasnya terhadap Organisasinya dipertanyakan. Akhirnya terjadilah suatu konflik fisik pada malam menjelang pemilihan kepala desa. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Kepala Desa Padas :

> "Pada malam pemilihan itu hampir terjadi perkelahian, ketika para kader saya yang mengirim makanan ke dukuh Seweru Rt 7 tidak bisa lewat akibat jalan didepan rumah Sayit ditutup kayu. Akhirnya Supri datang dan mengamuk disitu, untung saja bisa dilerai dan diredam emosinya".[37]

Secara relasional, perilaku konflik dalam tubuh Setia Hati Winongo ini mengindikasikan adanya permasalahan dari sisi pergeseran posisi patron dan clien. Pada kajian patronase motif kepentingan merupakan dasar dari adanya hubungan tersebut. Supri memiliki kekuasaan yang besar dalam organisasi Setia Hati Winongo. Kurangnya pengelolaan sumberdaya kekuasaan yang baik mengakibatkan gagalnya figur Supri dalam menghegemoni kekuasaan pemuda. Perubahan tersebut kemudian memunculkan suatu kepentingan lain dari Sayit yang ingin mencoba mengendalikan Setia Hati Winongo.

Posisi Sayit dimata masyarakat Dusun Sempu yang terkesan terpandang secara intelektualnya mengakibatkan bergesernya tokoh panutan masyarakat Dusun Sempu. Sehingga Sayit mencoba menarik kekuasaan Organisasi tersebut

[37] Wasis, *Wawancara*, Desa Padas, 21 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai alat kendaraan politiknya. Relasi tersebut berganti seiring perubahan kondisi sosial, dimana yang dahulunya Supri berperan sebagai patron kini berbalik tidak memiliki sumberdaya kekuasaan. Sedangkan Sayit memainkan perannya sebagai tokoh yang ingin memberikan perubahan pada Setia Hati Winongo sangat signifikan memengaruhi masyarakat.

Pada kasus konflik internal dalam tubuh Setia Hati Winongo ini menunjukkan kuatnya paradigma budaya pencak silat dalam mengintegrasi anggotanya. Hal ini karena meskipun adanya suatu gejolak, dengan perbedaan pandangan Supri dalam arah keputusan politiknya. Ternyata tidak berpengaruh secara signifikan pada kerusakan struktur Setia Hati Winongo. Ikatan yang bersifat tradisionalis menjadikan loyalitas dalam keteguhan ideologi kelompok sangat kuat. Oleh karenanya kepentingan yang berbasis individual tidak berpengaruh pada stigma anggota lainnya. Faktor kebudayaan yang sangat kental membentuk emosional yang kuat dalam memandang perubahan.

Peran Elite Organisasi pencak silat terlihat kontribusinya ketika pemilu dilaksanakan. Dimana besaran masa dan loyalitas kelompok dipertaruhkan dalam menjaga kehormatan dan martabat lingkungan. eksistensi organisasi pencak silat yang sangat produktif membangun loyalitas pemuda sangat berpeluang besar dalam menguasai kekuasaan lewat kesolidtan kelompoknya. Integrasi yang didasari solidaritas yang tinggi mampu menggerakan gerakan masa pencak silat dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sirkulasi Elite lokal Menurut Mosca, Pergantian Elite terjadi apabila Elite yang memerintah dianggap kehilangan kemampuannya dan orang luar di kelas tersebut menunjukkan kemampuan yang lebih baik, maka terdapat segala kemungkinan bahwa kelas yang berkuasa akan dijatuhkan digantikan oleh kelas penguasa yang baru.[38]

Atas dasar pandangan tersebut besar kemungkinan kekuasaan Elite pencak silat yang terstruktur rapi akan terus berkuasa jika tidak terjadi kekuatan pembanding lain. Besar kemungkinan konflik akan terjadi dalam ranah internal sendiri. Dikarenakan lingkup desa yang kecil sangat mungkin terjadinya varian kelompok kepentingan. Adanya konflik organisasi pencak silat ini adalah suatu tekanan kondisi yang memaksa adanya persaingan politik.

[38] Moch Nurhasim, *Konflik antar Elite politik lokal: dalam pemilihan kepala daerah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id